

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Bolleyer, N. (2016). *Political actors: parties–interest groups–government*. In *Handbook of research methods and applications in political science*. Edward Elgar Publishing.
- Diyah Ayu, P. P. (2016). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN*

*DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010-2013* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).

- Dwijayanti, P. (2012). KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG SINERGI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA. *GOVERNANCE-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Fadzil, Hanim, F., & Nyoto, H. (2011). Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. *World Review of Business Research*, Vol.1, No.2, pp. 51-70.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2006, pp. 53-54.
- Hirawan, Z. (2014). EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM PENYUSUNAN APBD KABUPATEN SUBANG. *Jurnal Administrasi Publik Volume 5, Nomor 2, Desember 2014*, 5(2).
- Islamiyah, Z. (2014). *Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Sop-Ap) Di Lembaga Pemerintah: Studi Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Jamiyla, Azwardi & Burhanuddin. (2013). Perilaku Organisasi dan Kinerja Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) pada Pemerintahan daerah di Sumatera Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado.
- Kosandi, Meidi. (2015). “Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014.” *Jurnal Politik 1* (No.1): 125-154.
- Laksono, F. (2017). Dimensi Manajerial dan Politik Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Ketepatan Waktu Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013-2015). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(1), 28-35.
- Latifah, N.P. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik ?. *Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010* : 85 – 94.
- Latour, Bruno. (2005). *Reassembling The Social ± An Introduction to Actor-Network Theory*. New York: Oxford University Press.
- Lindawati, S., & Adhi, S. (2017). Faktor - Faktor yang Melatarbelakangi Keterlambatan Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Blora Tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 211-220.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.

- Moha, M. B., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Studi Kasus pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2004-2013. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 17(2).
- Nawawi, 2003; *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Cetakan ke-7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.
- Nurhasanah, N., & Lambung, N. A. (2018). Analisis Hubungan DPRD Dan Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Tentang APBD. *Pencerah Publik*, 5(1), 1-9.
- Okfitasari, A. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris: Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah). *Jurnal Sainstech*, 2(4), 10-25.
- Pratiwi, R. N. (2012). Politisasi Anggaran Sektor Publik. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2).
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rosyada, Dede, Demokrasi (2000), Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah), hal 182
- Saifullah, A. M. (2014). Pengaruh Kesiapan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Limit Pada Peserta Didik Kelas XI Semester 2 Di Madrasah Aliyah Matholi'ul Huda Bugel Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013 (Doctoral Dissertation, IAIN Walisongo).
- Samuels, David. (2000). *Fiscal Horizontal Accountability ? Toward Theory of Budgetary "Checks and Balances" Presidential Systems. University of Minnesota, working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability of Notre Dame.*
- Suhardjanto dan Yulianingtyas, R. (2011) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret.
- Sumarto, Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2
- Sutaryo & Carolina. (2014). Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram.

- Sutaryo, dan Winarna, Jaka. (2013) Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Von Hagen, Jurgen. (2002). *Fiscal Rules, Fiscal Institutions, And Fiscal Performance. The Economic and Social Review*, 33(3):pp. 263-284.
- Wance, Marno. (2017). Politik Anggaran Eksekutif Dan Legislatif Pada Pembahasan Apbd Kabupaten Buru Selatan 2015. *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(2),
- Wance, Marno. (2019). "Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 5, No. 1
- Zimmerman, Jerold L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, Vol. 15, Studies on Measurement and Evaluation of the Economic Efficiency of Public and Private Nonprofit Institutions. pp. 107-144.